

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi yang terjalin antara Amerika Serikat dan Rusia paska perang dingin didasari pada hubungan kerjasama. Paska perang dingin, Amerika Serikat sebagai pemenang menjadi Negara yang mampu memberikan pengaruh internal kepada hampir seluruh Negara di dunia. Sedangkan Rusia cenderung menjadi Negara dengan kondisi politik yang tidak stabil. Interaksi yang terjalin antara kedua Negara hingga saat ini bisa dikatakan dinamis, meskipun ada potensi dan resiko yang dapat mengancam hubungan kedua Negara tersebut dimana adanya konflik-konflik yang melibatkan intervensi dari kedua Negara untuk dijadikan instrumen bagi Amerika Serikat dan Rusia untuk mempertahankan posisinya masing-masing.

Dalam beberapa tahun terakhir hubungan kerjasama antara kedua Negara disibukkan oleh permasalahan internasional masing-masing Negara. Dimana Amerika Serikat fokus pada permasalahan yang berada di tempat-tempat seperti Bosnia, Timur Tengah dan Tiongkok dan Rusia disibukkan oleh hubungannya dengan negara-negara CIS.¹ Sehingga kedua negara memiliki agenda kebijakan luar negeri yang berbeda. Namun, hubungan keduanya juga tidak bisa dikatakan berhenti, karena mulai ada kecenderungan bahwa kedua negara saat ini kembali memulai sebuah titik

¹ Andrei Kortunov. 1997. Russian – American Relations in the Post – Cold War Environment, Ponars Policy Memo 16, Moscow Public Science Foundation. Diakses dari http://csis.org/files/media/isis/pubs/pm_0016.pdf tanggal 1 Oktober 2015.

yang dinamakan *a New 'Cold War'*². *New 'Cold War'* termasuk cerminan dinamika hubungan Amerika Serikat dan Rusia saat ini. *New 'Cold War'* dapat kita temui dalam konflik yang terjadi di Crimea.

Konflik yang terjadi di Crimea berawal pada bulan November 2013 dimana Ukraina mengalami krisis dalam negeri yang dipicu gagalnya Presiden Viktor Yanukovych dalam melakukan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa yang kemudian Rusia bersedia memberi pinjaman hutang kepada Ukraina. Penerimaan pinjaman dari Rusia tersebut menyebabkan demonstrasi yang berujung bentrokan berdarah antara aparat keamanan dengan warga wilayah Barat yang menginginkan Ukraina mendekatkan diri dengan Eropa. Atas kejadian demonstrasi tersebut Perdana Menteri Mykola Azarov mengundurkan diri dan Yanukovych digulingkan dari pemerintahan, yang kemudian pemerintahan diambil alih oleh rezim pro Barat.³ Melihat kondisi politik internal Ukraina yang tidak stabil menjadi peluang bagi Rusia untuk terus menerus melakukan pendekatan ke wilayah selatan Ukraina yang berpenduduk mayoritas etnis Rusia dengan mengirim pasukan militernya ke Semenanjung Crimea pada tanggal 27 Februari 2014.⁴ Intervensi Rusia terus berlanjut hingga pada bulan Maret 2014, Rusia melakukan intervensi militer di Crimea yang merupakan wilayah kedaulatan

² Eric Zuesse, "Obama v. Putin: Their Debate on Crimea. The Source of the 'New Cold War'", diakses dari <http://www.globalresearch.ca/obama-v-putin-their-debate-on-crimea-the-source-of-the-new-cold-war/5479423> tanggal 4 Oktober 2015.

³ Deutsche Welle, "Ukraina Tegaskan Haluan Pro-Eropa", diakses dari <http://www.dw.com/id/ukraina-tegaskan-haluan-pro-eropa/a-18022879> tanggal 4 Oktober 2015.

⁴ Ruslan Burhani, "Pemimpin Ukraina peringatkan "agresi militer" Rusia di Crimea", diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/421322/pemimpin-ukraina-peringatkan-agresi-militer-rusia-di-crimea> tanggal 14 April 2014.

Ukraina yang hingga akhirnya 95.5% masyarakat Crimea setuju untuk bergabung dengan Rusia melalui proses *voting* referendum pada tanggal 16 Maret 2014.⁵ Referendum tersebut dinyatakan sah secara bebas dan adil dalam pelaksanaannya oleh Rusia. Akibat hal tersebut, Krisis di Ukraina yang semula hanya krisis dalam negeri, meningkat menjadi krisis internasional, setelah Rusia melakukan referendum penggabungan Crimea kedalam wilayah kedaulatan Rusia.

Namun di pihak lain Amerika Serikat beserta mayoritas anggota PBB tidak mengakui referendum tersebut dan menganggapnya sebagai pencaplokan wilayah secara illegal. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan Memorandum Budapest 1994 mengenai kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina dan *Treaty on Friendship and Cooperation* mengenai pengakuan kedaulatan yang telah ditandatangani Rusia.⁶ Pada resolusi sidang Dewan Keamanan PBB yang dirancang oleh Amerika Serikat tanggal 15 Maret 2014 diikuti 15 Negara anggotanya yang hasilnya adalah Rusia memveto resolusi, Tiongkok tidak memberikan suaranya, dan 13 negara memberikan suaranya. Tiongkok dan Rusia merupakan dua dari lima negara pemilik hak veto.⁷ Tetapi resolusi itu pada akhirnya ditolak oleh Rusia dengan menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap dewan

⁵ Chris Morris, "Crimea referendum: Voters 'back Russia union'", diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-europe-26606097> tanggal 4 Oktober 2015.

⁶ Daniel Dickinson, "General Assembly rejects Russia's annexation of Crimea", diakses dari http://www.unmultimedia.org/radio/english/2014/03/general-assembly-rejects-russias-annexation-of-crimea/#.VhPZF_mqqko tanggal 6 Oktober 2016.

⁷ Maria Rita Hasugian, "Rusia Veto Resolusi DK PBB tentang Crimea", diakses dari <http://dunia.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562653/rusia-veto-resolusi-dk-pbb-tentang-crimea> tanggal 6 Oktober 2015.

keamanan PBB. Sedangkan PBB hanya puas atas dua langkah yang sudah dilakukan. Pertama, Dewan Keamanan PBB telah menggelar voting atas krisis politik di Crimea dan Ukraina, itu pun dilakukan atas permintaan pemerintahan sementara Ukraina.⁸ Langkah kedua yang dianggap oleh PBB adalah sebuah langkah besar yaitu resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan negara-negara di dunia untuk tidak menerima referendum Crimea, resolusi ini disetujui 100 negara, ditolak 11 negara, dan ada 58 negara lainnya abstain.⁹ PBB merasa kedua langkah itu sudah cukup strategis dan besar untuk mengatasi krisis di Ukraina, padahal kedua langkah itu tidak berarti banyak seiring perkembangan politik yang terjadi di Ukraina.¹⁰

Dengan veto dari Rusia atas sidang resolusi PBB, AS dan Uni Eropa mulai menerapkan “sanksi otonomi” pada tanggal 17 Maret 2014 sebagai sanksi pertama kepada Rusia atas aneksasi yang dilakukannya terhadap Crimea berupa sanksi larangan visa dan perjalanan ke Eropa bagi warga Rusia, keputusan tersebut ditetapkan oleh Uni Eropa.¹¹ Disusul dengan sanksi tambahan pada tanggal 30 Juli 2014, Amerika Serikat dengan persetujuan Negara anggota Uni Eropa menyetujui sanksi baru terhadap Rusia, sanksi tersebut diantaranya membatasi akses ke pasar modal Uni

⁸ Elba Damhuri, “Atasi Krisis Ukraina, Peran PBB Lemah “, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/04/21/n4djf2-atasi-krisis-ukraina-peran-pbb-lemah> tanggal 6 Oktober 2016.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Renne R.A Kawilarang. “Crimea Resmi Dikuasai Rusia, Ukraina Tidak Berkutik”, diakses dari <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/489965-crimea-resmi-dikuasai-rusia--ukraina-tidak-berkutik> tanggal 14 April 2015.

Eropa untuk lembaga keuangan milik Rusia, menjatuhkan embargo perdagangan senjata, melarang ekspor untuk barang-barang untuk militer Rusia dan membatasi akses Rusia terhadap teknologi yang sifatnya sensitif, khususnya di sektor minyak.¹²

Sanksi Amerika Serikat tidak hanya berhenti sampai disitu. Pada tanggal 19 Desember 2015, Presiden Amerika Barack Obama memberlakukan larangan perdagangan yang luas di semenanjung Crimea melalui perintah eksekutif yang melarang ekspor barang dan jasa utama Amerika dan memblokir impor dari Crimea.¹³ Perintah tersebut untuk memberi kejelasan sikap Amerika bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang berbisnis di wilayah itu.¹⁴ Pernyataan itu juga menunjukkan bahwa Amerika tidak akan menerima pendudukan Rusia atas Crimea. Sanksi tambahan berlanjut pada tanggal 30 Juli 2015 dimana Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ke lebih kepada 11 personal dan 15 perusahaan Rusia.¹⁵ Di antara perusahaan-perusahaan baru termasuk adalah perusahaan afiliasi dari raksasa minyak Rusia Rosneft, serta beberapa organisasi terkait dengan salah satu bank utama negara Vnesheconombank.¹⁶ Kedutaan Amerika Serikat ke Rusia mengatakan bahwa Washington menganggap sanksi baru

¹² Denny Armandhanu, "AS dan Uni Eropa Jatuhkan Sanksi Baru Bagi Rusia", diakses dari <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/525434-as-dan-uni-eropa-jatuhkan-sanksi-baru-bagi-rusia> tanggal 14 April 2015.

¹³ VOA Indonesia, "Rusia Abaikan Sanksi Baru AS dan Uni Eropa Terkait Krimea", diakses dari <http://www.voaindonesia.com/content/rusia-abaikan-sanksi-baru-as-dan-uni-eropa-terkait-krimea/2567189.html> tanggal 7 Oktober 2015.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Russia Today, "US imposes further sanctions on Russia over Crimea, east Ukraine conflict", diakses dari <https://www.rt.com/business/311201-us-expands-russia-sanctions/> tanggal 7 Oktober 2015.

¹⁶ *Ibid*

bukan sebagai eskalasi ketegangan antara negara-negara melainkan sebagai "langkah rutin" dalam memperkuat kebijakan Amerika Serikat saat ini.¹⁷

Dengan berbagai argumen yang telah penulis paparkan diatas dapat dilihat bahwa berbagai upaya sudah dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik Crimea. Terutama upaya yang dilakukan Amerika Serikat melalui sidang PBB. Namun upaya tersebut dalam perspektif Amerika Serikat masih dirasa belum cukup sehingga Amerika Serikat menerpakan beberapa kebijakan sanksi terhadap Rusia dan melibatkan dirinya dalam penyelesaian konflik Crimea.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

“Mengapa Amerika Serikat terus menerus menerapkan kebijakan sanksi terhadap Rusia atas aneksasi Crimea?”

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Memahami akar permasalahan konflik Crimea dan keterlibatan Rusia didalamnya
2. Mengetahui kepentingan Pemerintah Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan sanksi terhadap Rusia terkait aneksasi wilayah yang dilakukan oleh Rusia di Crimea pada tahun 2014.

¹⁷ *Ibid*

D. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui mengapa sebuah fenomena bisa terjadi, peneliti membutuhkan alat untuk menganalisa permasalahan tersebut. Alat analisa tersebut dapat berupa kerangka berfikir atau biasanya berupa teori ataupun konsep. Dengan menggunakan teori ataupun konsep maka peneliti dapat mengupas permasalahan tersebut sehingga terlihat variabel variabelnya dan bagaimana bentuk hubungan antara variabel-variabel itu, sehingga diharapkan penulis mampu menjelaskan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini menempatkan kebijakan AS dalam pemberian sanksi terhadap Rusia atas aneksasi Crimea sebagai objek penelitian. Untuk meneliti masalah tersebut maka penulis menggunakan Konsep Politik Luar Negeri dan Konsep Kepentingan Nasional.

1. Konsep Politik Luar Negeri

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton pengertian Politik Luar Negeri adalah:

“Sebuah strategi atau tindakan terencana yang dibuat oleh pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik internasional yang lain untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasionalnya. Politik luar negeri yang dilakukan oleh suatu Negara bisa dilatarbelakangi oleh inisiatif Negara itu sendiri atau bisa juga sebagai reaksi atas tindakan yang telah dilakukan oleh Negara lain”¹⁸

¹⁸ Jack C. Plano and Roy Olton, *International Relations Dictionary*, Western Michigan University, California, 1980, hal 10.

Sementara itu menurut Rosenau, pengertian politik luar negeri adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.¹⁹

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan “*action theory*” atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu.²⁰ Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.²¹ Suatu komitmen pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.²²

Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri merupakan cerminan dari kepentingan nasional suatu Negara terhadap lingkungan eksternalnya. Hal tersebut dikemukakan oleh J.Frankel:

“Politik luar negeri merupakan cerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri, yang tidak terpisahkan dari keseluruhan tujuan nasional, dan tetap merupakan komponen atau unsur kondisi dalam negeri”²³

¹⁹ James N. Rosenau, Gavin Boyd, dan Kenneth W. Tompson, *World Politics: An Introduction*, The Free Press, New York, 1976, hal 27.

²⁰ Yayan M. Yani dan Anak Agung B.P, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal 35.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ J.Frankel, *Hubungan Internasional*, ANS Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1990, hal 55.

Dengan demikian dapat kita peroleh bahwa politik luar negeri adalah suatu komitmen berupa sikap, tindakan, atau tata cara yang dilakukan oleh suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam uapayanya mencapai tujuan tertentu. Komitmen tersebut bisa lahir dari inisiatif negara itu sendiri atau bisa pula lahir untuk menanggapi permasalahan yang terjadi di lingkungan eksternalnya, dimana lingkungan eksternal tersebut memiliki pengaruh atas tujuan yang ingin ia capai. Dan tujuan-tujuan tersebut merupakan kebutuhan vital yang ada dalam kepentingan nasional.

2. Konsep Kepentingan nasional

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, definisi kepentingan nasional adalah

“Tujuan pokok yang paling penting yang menjadi pedoman para pembuat keputusan di suatu Negara dalam membuat kebijakan politik. Negara akan mengedepankan apa yang paling penting kebutuhannya secara umum. Termasuk didalamnya hak untuk mempertahankan diri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan serta kesejahteraan ekonomi”²⁴

Kepentingan nasional merupakan tujuan nasional yang dijadikan dasar untuk memandu para pembuat kebijakan dalam menentukan politik luar negerinya. Setidaknya, ada lima kebutuhan vital yang dapat menyebabkan sebuah negara dalam mengambil kebijakan politiknya yaitu: (1) *self preservation*, yakni faktor yang meliputi kebutuhan untuk memelihara keberadaan, identitas, serta nilai-nilai yang dimiliki agar ia terbebas dari pengaruh yang timbul atas keberadaan, dan nilai-nilai yang

²⁴ Jack C. Plano and Roy Olton, *International Relations Dictionary*, Western Michigan University, California, 1980, hal 10.

dimiliki oleh negara lain; (2) *independence*, yakni faktor yang meliputi kebutuhan untuk memiliki negara yang sepenuhnya berdaulat, serta pemerintahan yang dalam menjalankannya ia tidak takluk dan tunduk kepada negara lain; (3) *territorial integrity*, yakni faktor yang meliputi kebutuhan untuk memelihara keutuhan wilayah nasionalnya; (4) *military security*, yakni kebutuhan untuk memelihara kekuatan militernya. Dan menjaga agar tidak ada kekuatan militer lain yang dapat mengancam keamanannya; (5) *economic well-being*, yaitu kebutuhan untuk dapat meningkatkan kemampuan, pendapatan, dan kesejahteraan di bidang ekonomi bagi negara dan rakyatnya.²⁵

Dengan menggunakan konsep di atas sebagai kerangka berfikir, dapat kita peroleh bahwa faktor *self preservation*, *independence*, *territorial integrity*, *military security*, serta *economic well-being* masing-masing memiliki andil yang besar dalam perilaku sebuah negara terhadap lingkungan eksternalnya. Pembuat kebijakan akan mengambil sebuah sikap, atau tindakan yang diperlukan terhadap lingkungan eksternalnya untuk memenuhi salah satu, sebagian, atau bahkan kelima kebutuhan vital tersebut.²⁶ Dalam konteks kebijakan Amerika Serikat dalam pemberian sanksi terhadap Rusia ada satu poin dalam konsep kepentingan nasional di atas sebagai faktor pendorong, faktor pendorong tersebut ialah dalam hal

²⁵ Erol Saputra, Kebijakan AS Terhadap Ukraina, Yogyakarta: 2015, Fisip, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

²⁶ Ibid.

kepentingan keamanan.²⁷ Amerika Serikat memiliki wilayah kepentingan yang sangat luas dan hampir tersebar di seluruh negara. Sehingga, keamanan wilayahnya tidak lagi menjadi batas jangkauan kepentingan keamanan bagi Amerika Serikat, tetapi termasuk wilayah negara-negara sekutunya khususnya anggota NATO.²⁸ Oleh karena itu, keamanan militer menjadi faktor utama yang mendorong kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam pemberian sanksi terhadap Rusia.

Dalam segi militer, letak strategis Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia menjadikannya palang pintu yang memisahkan antara pengaruh Barat dan Rusia. Dengan kendali atas Ukraina, AS dapat memperbesar pengaruh militernya di Eropa TImur hingga ke daerah perbatasan dengan Rusia melalui perluasan NATO ataupun melalui kerjasama keamanan.²⁹ Selain itu, wilayah selatan Ukraina yaitu Crimea memiliki akses langsung dengan Laut Hitam juga menjadi nilai penting bagi kepentingan keamanan Amerika Serikat.³⁰ Dimana Laut Hitam ini di kelilingi oleh tiga negara anggota NATO yaitu Turki, Bulgaria dan Rumania yang selama ini menyediakan teritorial lautnya bagi militer NATO.³¹ Dan pelabuhan-pelabuhan di wilayah itu sudah lama dikuasai oleh

²⁷ Barry Posen, "Ukraine: Part of America's "Vital Interests"?", diakses dari <http://nationalinterest.org/feature/ukraine-part-americas-vital-interests-10443> tanggal 7 Oktober 2015.

²⁸ U.S. Department of State, "Assurance Measures & Commitment to European Security", diakses dari <http://nato.usmission.gov/assurance-measures.html> 7 Oktober 2015.

²⁹ Gyula Bene, "NATO Expansion In Central And Eastern Europe", diakses dari <http://fas.org/man/eprint/bene.htm> tanggal 7 Oktober 2015.

³⁰ Richard Weitz, "After Ukraine, Black Sea Becomes Contested Zone for Russia, NATO", diakses dari <http://www.worldpoliticsreview.com/articles/14556/after-ukraine-black-sea-becomes-contested-zone-for-russia-nato> tanggal 7 Oktober 2015.

³¹ Russia Today, "6 NATO warships take part in Black Sea naval drills", diakses dari <https://www.rt.com/news/239377-nato-drills-black-sea/> tanggal 7 Oktober 2015.

Rusia sebagai pangkalan militer yang penting bagi angkatan Laut Rusia.³² Sehingga sanksi-sanksi yang diterapkan oleh AS ini menjadi alat yang digunakan oleh AS untuk mengembalikan *status quo ante* Ukraina atau integritas wilayah sebelum aneksasi Rusia.³³ Dengan kerjasama yang intensif serta kesepakatan dengan Ukraina, maka AS akan mampu menghadirkan kekuatan militernya di wilayah tersebut dan akan mendominasi wilayah Laut Hitam.³⁴

3. Konsep *Balance Of Power*

Balance of Power atau yang selanjutnya disebut BoP menurut Morgenthau adalah aspirasi Negara-negara untuk memperoleh *power*, mempertahankan atau menumbangkan *status quo* dan membuat konfigurasi *power*.³⁵ Tujuan *Balance of Power* menurut Morgenthau adalah mencapai stabilitas sistem.³⁶ Sedangkan *power* menurut Gilpin adalah kemampuan aktor dalam mempengaruhi aktor lain.³⁷

Balance of Power berasal dari strategi *balancing* yang dilakukan Negara-negara di level sistematis (internasional) atau subsistematis (regional) sebagai hasil dari *equilibrium power* di antara negara-negara

³² Gyula Bene, *Loc.Cit.*

³³ Barry Posen, *Loc.Cit.*

³⁴ Ariel Cohen dan Conway Irwin, "U.S. Strategy in the Black Sea Region", diakses dari www.heritage.org/research/reports/2006/12/us-strategy-in-the-black-sea-region tanggal 7 Oktober 2015.

³⁵ Hans J. Morgenthau dan Kenneth W. Thompson: *Politik Antar Bangsa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) hal 199-200.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Michael Sheehan: *The Balance of Power: History and Theory* (London and New York: Routledge Taylor and Francais Group, 1996) hal 15.

kunci.³⁸ Tujuan dari *balancing* adalah untuk mencegah hegemon Negara lain dan jika usaha pencegahan ini berhasil artinya *Balance of Power* telah tercipta dalam sistem internasional atau regional.³⁹

Dalam hal ini, Amerika Serikat menerapkan sanksi kepada Rusia merupakan bentuk pencegahan atas agresifitas Rusia yang semakin meningkat di Eropa Timur. Dengan memperluas kekuatan NATO akan memungkinkan bagi AS untuk mempertahankan hegemoninya di Eropa dan mencegah kekuatan lain yang semakin meningkat yaitu Rusia.

E. Hipotesa

Dengan memahami latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dari skripsi ini adalah:

Amerika Serikat terus menerus menerapkan kebijakan sanksi terhadap Rusia atas aneksasi Crimea karena adanya kepentingan nasional yaitu untuk memperluas NATO dengan memanfaatkan letak strategis Ukraina sebagai zona penyangga antara Barat dan Rusia, serta akses langsung ke Laut Hitam yang dimiliki wilayah Selatan Ukraina yaitu Crimea.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penelitian ini akan berusaha menjelaskan, mencatat, menganalisa serta menginterpretasikan kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Sesuai dengan

³⁸ T.V. Paul, James J. Wirtz, and Michel Fortmann: *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century* (California: Stanford University Press, 2004) hal 2.

³⁹ *Ibid.*

jenis penelitian, maka jenis data yang akan penulis gunakan adalah data-data kualitatif.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah cara penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* yang dimaksud adalah dengan mencari berbagai informasi, berita analisis, konsep-konsep hasil pemikiran para ahli yang dimuat di buku, karya tulis ilmiah, artikel, internet, media cetak, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema. Oleh karena itu metode analisis yang akan penulis gunakan adalah metode kontekstual dan kategorial. Metode kontekstual yang dimaksud adalah mencari data-data dan informasi yang sesuai dengan dimensi waktu yang telah ditentukan. Kemudian data-data tersebut akan dicocokkan dengan kategori-kategori yang telah dikelompokkan berdasarkan pada definisi-definisi konseptual dalam kerangka pemikiran.

G. Jangkauan Penulisan

Penelitian ini dibatasi dalam jangka waktu antara bulan November 2013 ketika Ukraina mengalami krisis politik dalam negeri. Jangkauan penelitian ini berakhir pada bulan Juli 2015 ditandai dengan pemberian sanksi yang diberlakukan AS kepada perusahaan-perusahaan Rusia.

H. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi garis besar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan bab-bab selanjutnya.

Bab II: Akar Permasalahan Konflik Crimea Dan Keterlibatan Amerika Serikat di Dalamnya.

Pada bab ini bertujuan untuk mengetahui akar permasalahan konflik Crimea serta keterlibatan Rusia dalam krisis Ukraina.

Bab III: Respon Masyarakat Internasional Terkait Referendum Crimea Dan Penerapan Sanksi Terhadap Rusia.

Pada bab ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana respon dari masyarakat internasional diantaranya Amerika Serikat, Uni Eropa dan Negara-negara anggota PBB atas referendum Crimea. Selanjutnya akan dibahas bagaimana Upaya Amerika Serikat dan PBB dalam menangani konflik yang terjadi di Crimea. Dalam bab ini juga akan dijelaskan bentuk-bentuk sanksi yang diberikan Amerika Serikat dan Uni Eropa kepada Rusia.

Bab IV: Kepentingan Amerika Serikat Untuk Memperluas NATO Dalam Kebijakan Penerapan Sanksi Terhadap Rusia

Pada bab ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait pemberian sanksi pada Maret 2014 - Juli 2015 terhadap Rusia digunakan sebagai sarana untuk mengakomodasi kepentingannya dalam memperluas NATO.

Bab V: Penutup

Merupakan bagian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah.